



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 6 Desember 2016 No. 97
Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
- 2. Jabatan : CAMAT - PRAMBANAN
- 3. Tempat & Tanggal Lahir : SEMARANG, 10 Juli 1971
- 4. Alamat Kantor : Jl. KRANGGAN BOKOHARJO PRAMBANAN, SLEMAN
- 5. Tanggal Pelaporan : 2 Oktober 2012

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. **108.214.000**
(TANAH DAN BANGUNAN)

- 1. Tanah & Bangunan seluas 120 m2 & 100 m2, di Kabupaten SLEMAN, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2005 sampai dengan 2006 NJOP Rp.108.214.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA Rp. **85.000.000**

- 1. Mobil, merk TOYOTA COROLLA, tahun pembuatan 1996, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 nilai jual Rp.85.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp. **0**

c. HARTA BERGERAK Rp.	0
LAINNYA		
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2012 dengan nilai jual Rp.0		
C. SURAT BERHARGA Rp.	35.000.000
1. Tahun investasi dari 2010 sampai dengan 2012 yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai jual Rp.35.000.000		
D. GIRO DAN SETARA KAS Rp.	40.000.000
LAINNYA		
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.40.000.000		
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	268.214.000
III. HUTANGRp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	268.214.000



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis